



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

BPK Berikan Catatan Kinerja OPD Pemprov dan Pemkab Kepahiang

BENGKULU, BE - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menyelesaikan penilaian pemeriksaan kinerja di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu. Dalam penilaian itu, masih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapatkan catatan-catatan penting atas menurunnya kinerja

pemerintah daerah. Beberapa program yang dinilai seperti bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Penilaian itu menjadi tolak ukur presentasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ada 6 catatan penting yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemrov Bengkulu selama 60 hari kedepan.

▶ *Baca BPK ...Hal 15*

"Selambat-lambatnya, 60 hari kedepan, harus ditindaklanjuti," ujar Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, R Aryo Seto Bomantari dalam penyerahan LHP kinerja efektivitas pengelolaan belanja daerah kepada Pemrov Bengkulu di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu, Selasa (31/12) lalu.

Tidak hanya, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja, atas upaya pemerintah daerah melalui penerbitan dan implementasi peraturan-peraturan daerah. Aturan itu berfungsi untuk mendorong peran swasta dan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian

yang dapat meningkatkan pembangunan manusia di daerah. Begitupun, penilaian atas anggaran, meliputi pengelolaan belanja pada tahun 2016 sampai dengan 2018. "Semua lingkup kinerja, kita lakukan pemeriksaan," tambahnya.

Sebanyak 6 temuan itu, menurut Aryo harus segera diselesaikan. Sebab, apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov Bengkulu, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. "Tentunya akan mempengaruhi peningkatan IPM," beber Aryo.

Tidak hanya pemrov yang dinilai, BPK juga memberikan penilaian atas kinerja pemda Kepahiang. Ada 4 catatan penting yang harus ditindaklanjuti. (lihat grafis). Sama halnya dengan pemprov, jika temuan itu tidak ditindaklanjuti oleh Pemda Kepahiang, maka dapat mempengaruhi pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. "Kita berharap, dalam 60 hari kedepan bisa diselesaikan," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Bengkulu, Deddy Ermansyah mengatakan, temuan kinerja jelak itu terbanyak ada di Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan dan Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu. "Secara mendasar, catatan itu ada rata-rata di OPD," terang Deddy.

Atas catatan tersebut, Deddy meminta kepada OPD tidak mengulangi lagi. Termasuk melakukan perbaikan kinerja. Jangan sampai atas kinerja buruk, maka target peningkatan IPM tidak tercapai. "Kepada OPD jangan mengulangi lagi," tegasnya. Begitupun ditindaklanjuti, pemprov akan menindaklanjuti temuan kinerja itu selama 60 hari kedepan. "Ini penilaian kinerja, bukan keuangan. Tidak begitu bearti temuannya, tapi tetap kita tindaklanjuti," tutup Deddy. (151)